

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
(Studi Empiris pada Kecamatan Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi)**

Elfi Ilham, Kamaliah & Ahmad Rifqi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Email: ilhamelfi@yahoo.co.id, kamaliah affan@yahoo.com, eki161069@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of communication, bureaucratic structure, implementing attitude, environmental conditions and the size and objectives of the policy on the implementation of the Village Fund Allocation policy in 20 villages in the Central Kuantan Subdistrict of Kuantan Singingi Regency. The population in this study were all villages located in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, while the respondents consisted of 6 people, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, LPMD, BPD, and Community Leaders, so that the population was 120 people. The sampling method used in this study is saturated sampling method or census method, namely the overall population method. Thus, the number of sampling taken is all members of the population as many as 120 people as respondents. This study uses primary data obtained from questionnaires to respondents. The statistical method used to test the research hypothesis is multiple regression method with software assistance (Statistical Product and Service Solution) version 22.0. The results of the study prove that communication, bureaucratic structure, implementing attitudes, environmental conditions and policy measures and objectives influence the implementation of the Village Fund Allocation policy

Keywords : communication, bureaucratic structure, implementing attitude, environmental conditions and the size and objectives of the policy, the implementation of the Village Fund Allocation policy

PENDAHULUAN

Konsekuensi logis dari lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal. Sistem desentralisasi fiskal yang berlangsung dengan melibatkan desa sebagai sasaran distribusinya melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan (Prasetyo, 2015).

Alokasi dana desa bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan partisipatif sesuai dengan potensi desa. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa merupakan suatu proses untuk membuat suatu kebijakan tentang alokasi dana desa agar bisa terselenggara di lapangan oleh

pelaksana kegiatan sehingga dapat memberi hasil yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa permasalahan terkait penggunaan alokasi dana desa. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Seharusnya dalam rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa lainnya. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses implementasi alokasi dana desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun permasalahan yang terkait dengan penggunaan ADD adalah adanya dugaan penyelewengan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kuantan Tengah. Sebagian besar masyarakat meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar turun langsung ke lapangan memeriksa berbagai pekerjaan di Desa Kuantan Tengah yang bersumber dari Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini terjadi karena tidak transparannya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta tidak diikutsertakannya Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD) dalam rapat pengelolaan dan pencairan anggaran alokasi dana desa. Sehingga pekerjaan fisik maupun non fisik yang ada di desa tersebut tidak maksimal, dan sebagian besar laporan anggarannya tidak di musyawarahkan dengan masyarakat sehingga menimbulkan adanya indikasi dana yang sudah habis. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, kepala desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. (Warna Riau.Com, 22 Juli 2016).

Karena sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Implementasi kebijakan alokasi dana desa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain komunikasi, struktur birokrasi, sikap pelaksana, kondidi lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Leo, 2008:23).

b. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan (Widjaja, 2000).

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan tata pola yang menghubungkan antara bagian-bagian kerja berdasarkan kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan dalam organisasi dipemerintahan yang diatur berdasarkan kebijakan pemerintah (Adityawarman, 2011).

d. Sikap Pelaksana

Sikap merupakan kumpulan dari berfikir, keyakinan dan pengetahuan. Namun di samping itu evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya berhubungan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang. Sehingga komponen kognisi melukiskan obyek tersebut, dan sekaligus dikaitkan dengan obyek-obyek lain di sekitarnya. Hal ini berarti adanya penalaran pada seseorang terhadap obyek mengenai karakteristik (Mar'at, 1982: 13-14).

e. Kondisi Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan merupakan kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap kinerja organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan/pegawai organisasi, serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung (Robbins, 2003:52).

f. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun demikian, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengukur pencapaian.

Ada dua penyebab untuk menjawab hal ini, yaitu pertama, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kontradiksi-kontradiksi dan bias dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan (Metter dan Horn. 1975:82).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Implementasi kebijakan alokasi dana desa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain komunikasi, struktur birokrasi, sikap pelaksana, kondisi lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku. Artinya, semua informasi tentang implementasi Alokasi Dana Desa yang transparan dan akuntabel sudah diuraikan secara jelas dalam buku petunjuk teknis dan sebagian besar pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Sehingga, dari komunikasi informasi ini, para pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa telah memperoleh kejelasan dalam mengelola Alokasi Dana Desa sehingga tercapai implementasi Alokasi Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

Selain dikomunikasikan dengan jelas, implementasi Alokasi Dana Desa wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga harus mempunyai akses dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, sehingga prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat tercapai.

Dengan demikian, dalam rangka mencapai implementasi kebijakan alokasi dana desa akan dipengaruhi struktur birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Struktur birokrasi merupakan kerangka organisasi di pemerintahan yang menggambarkan tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggungjawab, jabatan dan jumlah pejabat dalam setiap unit-unit pelaksanaan pekerjaan. Struktur biasanya berbentuk bagan organisasi (organization chart) baik berbentuk lini, lini dan staf dan matriks. Bentuk struktur organisasi biasanya ditandai dengan garis hubungan yang bersifat vertikal antara setiap lingkungan organisasi.

Struktur birokrasi juga dapat dijelaskan sebagai tata pola yang menghubungkan antara bagian-bagian kerja berdasarkan kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan dalam organisasi pemerintahan yang diatur berdasarkan kebijakan pemerintah (Aditiyawarman, 2011).

Oleh karena itu, struktur birokrasi atau struktur organisasi dari pengelola Alokasi Dana Desa harus jelas, berikut dengan tugas masing-masing pengelola Alokasi Dana Desa tersebut mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan agar tercapai keberhasilan dalam implementasi Alokasi Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya sikap pelaksana, sikap pelaksana dan implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan

besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit (Mar'at, 1982: 13-14). Oleh karena itu, sikap pelaksana berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa.

Selain komunikasi, struktur birokrasi dan sikap pelaksana, kondisi lingkungan juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan merupakan kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap kinerja organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Robbins, 2003:52).

Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktifitas, baik secara langsung maupun secara tak langsung. Sehingga kondisi lingkungan akan mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa karena lingkungan merupakan sumber pemasok input bagi organisasi, dan juga sebagai penerima output dari organisasi itu sendiri. Dalam hal implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa, kemampuan, peran serta keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sebagai lingkungan utama desa sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Faktor lain yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana desa adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh (Metter dan Horn. 1975:82). Mazmanian dan Sabatier (1983:61) juga menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana. Ukuran dan tujuan kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa. Dalam hal ini, ukuran kebijakan menunjukkan kesesuaian program dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Sementara tujuan kebijakan menunjukkan ketepatan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan. Kedua hal tersebut akan mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana desa.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Komunikasi berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
- H₂ : Struktur Birokrasi berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
- H₃ : Sikap Pelaksana berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
- H₄ : Kondisi Lingkungan berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
- H₅ : Ukuran dan Tujuan Kebijakan berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di 20 desa dalam wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan lama waktu penelitian selama 6 bulan, yaitu dari bulan Maret s/d Agustus 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur/ perangkat pemerintah yang terlibat dan mengetahui tentang pengelolaan ADD di 20 desa dalam wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling jenuh atau metode sensus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 2 cara yaitu penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data-data sekunder dan penelitian lapangan melalui penyebaran kuesioner. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komunikasi (X1) dan Struktur Birokrasi (X2), Sikap Pelaksana (X3), Kondisi Lingkungan (X4) serta Ukuran dan Tujuan Kebijakan (X5). Sedangkan variabel terikatnya (dependen) adalah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Y).

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah metode regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan software SPSS versi 22.0, dengan model penelitian sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

- Y = Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
- β_0 = Konstanta
- $\beta_{(1,2,3,4,5)}$ = Koefisien regresi masing-masing X
- X₁ = Komunikasi
- X₂ = Struktur Birokrasi
- X₃ = Sikap Pelaksana
- X₄ = Kondisi Lingkungan
- X₅ = Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- e = Variabel yang tidak teridentifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada seluruh aparatur maupun perangkat yang langsung terlibat dan mengetahui tentang pengelolaan ADD di 20 desa dalam wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Tabel berikut ini akan menjelaskan tingkat pengembalian kuesioner:

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner yang dibagikan	120
Kuesioner yang tidak direspon	<u>28</u>
Kuesioner yang digunakan	92
Tingkat pengembalian kuesioner	
$\frac{92}{120} \times 100\% = 76.7\%$	

Sumber : Data Primer yang diolah

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu kompetensi sumberdaya manusia, sikap pelaksana, kondisi lingkungan, ukuran dan tujuan kebijakan serta implementasi kebijakan alokasi dana desa disajikan dalam tabel

descriptive statistics yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean* dan *standar deviasi* yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Y)	92	15.00	25.00	19.7815	2.88470
Komunikasi (X ₁)	92	10.00	25.00	18.7195	2.74548
Struktur Birokrasi (X ₂)	92	10.00	25.00	18.9234	2.65342
Sikap Pelaksana (X ₃)	92	10.00	25.00	19.4390	2.63920
Kondisi Lingkungan (X ₄)	92	16.00	40.00	31.0352	4.32361
Ukuran dan Tujuan Kebijakan (X ₅)	92	12.00	20.00	16.1853	2.26274

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Selanjutnya hasil analisis pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis Coefficients^a

Model	T	Sig.	Kesimpulan
(Constant	2.702	.008	
Komunikasi (X ₁)	2.152	.001	Berpengaruh
Struktur Birokrasi (X ₂)	2.228	.001	Berpengaruh
Sikap Pelaksana (X ₃)	3.952	.000	Berpengaruh
Kondisi Lingkungan (X ₄)	3.222	.001	Berpengaruh
Ukuran dan Tujuan Kebijakan (X ₅)	5.182	.000	Berpengaruh

a. Dependent Variable: Implementasi ADD

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan alokasi dana desa. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku. Artinya, semua informasi tentang implementasi Alokasi Dana Desa yang transparan dan akuntabel sudah diuraikan secara jelas dalam buku petunjuk teknis dan sebagian besar pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Sehingga, dari komunikasi informasi ini, para pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa telah memperoleh kejelasan dalam mengelola Alokasi Dana Desa sehingga tercapai implementasi Alokasi Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, struktur birokrasi juga berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan alokasi dana desa. Struktur birokrasi atau struktur organisasi dari pengelola Alokasi Dana Desa desa dalam wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sudah cukup jelas,

berikut dengan tugas masing-masing pengelola Alokasi Dana Desa tersebut mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas ini, keberhasilan dalam implementasi Alokasi Dana Desa yang transparan dan akuntabel dapat tercapai.

Kemudian variabel sikap pelaksana juga terbukti berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan alokasi dana desa. Sikap dari pelaksana berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin kebijakan yang telah disusun berjalan efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui yang bisa dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan (Meter dan Horn, 1975).

Variabel kondisi lingkungan juga terbukti berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan alokasi dana desa. Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu. Pada konteks implementasi ADD terdapat tiga dimensi utama lingkungan organisasi, yaitu kapasitas lingkungan, kestabilan peran, kompleksitas lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tuwadan (2014) yang menyatakan bahwa kondisi lingkungan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kapasitas BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan alokasi dana desa serta adanya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam membantu pelaksanaan alokasi dana desa. Kondisi ekonomi, sosial dan politik desa juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.

Selanjutnya, variabel ukuran dan tujuan kebijakan juga berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyo (2014) yang menyatakan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari alokasi dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian antara implementasi ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa di Wilayah Kecamatan Rembang, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji beberapa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sikap pelaksana, kondisi lingkungan, serta ukuran dan tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah, kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi terbukti berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa.
- b. Struktur birokrasi terbukti berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa.

- c. Sikap pelaksana terbukti berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa.
- d. Kondisi terbukti berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa.
- e. Ukuran dan tujuan kebijakan terbukti berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman, 2011, Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Mutu Pelayanan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, *Cakrawala Galuh* Vol. I No. 6 September 2011.
- Leo, Agustino, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
- Mar'at, 1981. *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*, Ghalian, Bandung.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter Van, Horn Van, 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Adminstration and Society*, Sage London.
- Robbins, S, 2003. *Perilaku Organisasi*. Edisi I Bahasa Indonesia. PT. Indeks. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
- Widjaja,HAW. 2000. *Ilmu Komunikasi : Pengantar Studi*. PT Rineka Cipta. Jakarta.